



**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPUASAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM RUMAH HUNIAN SEMENTARA
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG
SEMERU**

(STUDI KASUS DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Andhika Hidayat Soekotjo

NPM 21901091079



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Andhika Hidayat Soekotjo, 21901091079, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2023, **Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Program Rumah Hunian Sementara Bagi Masyarakat Yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru (Studi Kasus Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang**, Dosen Pembimbing I Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP, M.AP

Indonesia berada di wilayah yang rawan bencana alam atau disebut dengan wilayah ring of fire (cincin api pasifik) hal ini dibuktikan dengan Kondisi yang terjadi saat erupsi Gunung Semeru, Masyarakat yang mengungsi di 151 titik pengungsian yang terpusat di 3 kecamatan tersebar 118 titik di Kabupaten Lumajang dan 14 titik di luar Kabupaten Lumajang (BPBD, 2021). Sehingga pada penelitian ini dilakukan atas dasar pengaruh kebijakan pemerintah kabupaten lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam program rumah hunian sementara. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang terkumpul menggunakan analisis data regresi sederhana. Hasil penelitian berdasarkan uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa kebijakan untuk membangun rumah hunian sementara oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang telah signifikan dalam kepuasan masyarakat yang menghuni rumah hunian sementara yang dibuktikan dengan r hitung lebih besar daripada r table dan nilai probabilitas (sig) kurang dari 0,05 dengan demikian, semua pernyataan penelitian pada telah valid dan berdasarkan uji realibilitas menunjukkan nilai koefisien Alpha Cronbach kebijakan pemerintah (X) 0,887 dan kepuasan masyarakat (Y) 0,843 hasil tersebut menunjukkan lebih dari 0,6 jika instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan. Hasil dari uji heterokedastisitas 0,126 yang lebih dari 0,5 maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada data residual. Hasil uji normalitas 0,066 yang lebih dari 0,5 maka dari itu diperoleh keputusan terima H_0 dengan kesimpulan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil dari uji F atau anova adalah 0,00 kurang dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variable kepuasan masyarakat atau dengan kata lain ada pengaruh variable Kebijakan Pemerintah (X) terhadap variable Kepuasan Masyarakat (Y). Hasil analisis diperoleh nilai R Square 0.308 menunjukkan jika kebijakan pemerintah mempengaruhi kepuasan masyarakat sebesar 30.8% dan sisanya sebesar 59.2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Koefisien regresi X sebesar 0.441 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variable Kebijakan Pemerintah (X) dengan variable Kepuasan Masyarakat (Y) yang mengindikasikan jika makin baik Kebijakan Pemerintah (X) maka akan meningkatkan Kepuasan Masyarakat. diketahui juga nilai signifikan t sebesar 0.000 kurang dari 0.05 menunjukkan jika



Kebijakan Pemerintah (X) berpengaruh signifikan terhadap variable Kepuasan Masyarakat (Y).

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kepuasan Masyarakat, Rumah Hunian Sementara



SUMARRY

Andhika Hidayat Soekotjo, 21901091079, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Science, Islamic University of Malang, 2023, **The Effect of Government Policy on Community Satisfaction in the Temporary Residential Program for People Affected by the Eruption of Mount Semeru (Case Study of Sumber Mujur Village, Candipuro District, Lumajang Regency**, Lecturer Advisor I Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si , Supervisor II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP, M.AP

Indonesia is located in an area that is prone to natural disasters or is called the ring of fire area (Pacific ring of fire). and 14 points outside Lumajang Regency (BPBD, 2021). So that this research was carried out on the basis of the influence of the Lumajang district government policy on community satisfaction in procuring temporary residential houses for people affected by the eruption of Mount Semeru. The purpose of this study was to determine the effect of the Lumajang District Government policy on community satisfaction in the temporary housing program. The research approach uses quantitative with descriptive research types. Data collected using simple regression data analysis. The results of the research based on validity and reliability tests show that the policy to build temporary residential houses by the Government of Lumajang Regency has been significant in the satisfaction of the people living in temporary residential houses as evidenced by the r count greater than the r table and a probability value (sig) of less than 0.05 Thus, all research statements have been valid and based on the reliability test showed a Cronbach Alpha coefficient value of government policy (X) 0.887 and community satisfaction (Y) 0.843. These results showed more than 0.6 if the question instrument used in this study was reliable or reliable. The results of the heteroscedasticity test were 0.126 which was more than 0.5, therefore it was concluded that there was no heteroscedasticity in the residual data. The result of the normality test is 0.066 which is more than 0.5, therefore a decision is obtained to accept H_0 with the conclusion that the residual data is normally distributed. The result of the F test or ANOVA is 0.00 less than 0.05, so the regression model can be used to predict community satisfaction variables or in other words, there is an influence of the Government Policy variable (X) on the Community Satisfaction variable (Y). The results of the analysis obtained an R Square value of 0.308 indicating that government policies affect community satisfaction by 30.8% and the remaining 59.2% is influenced by other variables not examined. The regression coefficient X of 0.441 indicates that there is a positive influence between the Government Policy variable (X) and the Community Satisfaction variable (Y) which indicates that the better the Government Policy (X) will increase Public Satisfaction. it is also known that the significant value of t is 0.000 less than 0.05 indicating that Government Policy (X) has a significant effect on the Public Satisfaction variable (Y).

Keywords: Government Policy, Community Satisfaction, Residential Houses

Temporary

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan hal yang tidak terduga dan tidak bisa dihindari atas kerugian yang ditimbulkannya. Masyarakat secepat mungkin menyelamatkan hidupnya dan mengungsi ke tempat yang lebih aman dari tempat bencana dan meninggalkan segala kekayaan harta bendanya. Indonesia berada di wilayah yang rawan akan bencana alam atau disebut dengan wilayah *ring of fire* (cincin api pasifik), itu mengapa yang membuat Indonesia sering terkena bencana alam dan juga memiliki sisi positif yaitu tanah yang subur dan kaya akan hasil bumi. Erupsi gunung merupakan bencana alam yang membuat kerugian cukup banyak di masyarakat.

Menurut Taufik Kartiko (2013), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Di Indonesia lembaga pemerintah yang secara khusus melakukan upaya penanggulangan bencana adalah BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Fungsi BNPB dan BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Data di lapangan menunjukkan kondisi yang sedang terjadi saat erupsi gunung semeru, banyak masyarakat yang segera mencari perlindungan diri. Terlihat dari masyarakat yang mengungsi di 151 titik pengungsian yang terpusat di 3 kecamatan, tersebar 118 titik di Kabupaten Lumajang dan tersebar di 14 titik di luar Kabupaten Lumajang. (BPBD, 2021)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyatakan sebanyak 1027 rumah huni, 1 fasilitas kesehatan, 1 jalur penghubung, 24 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas ibadah mengalami kerusakan. Kerugian lain

yang ditimbulkan adalah 764 ekor sapi potong, 684 ekor kambing/domba, 1578 ekor unggas.

Akibat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan erupsi gunung semeru berdasarkan data kementerian PUPR pada Mei 2022 rencana target rumah yang dibangun sebanyak 1951 unit, 878 unit rumah hunian sementara dibangun oleh 81 NGO dengan rincian 437 unit dalam kategori sudah selesai, 441 unit dalam proses penyelesaian dan 130 unit sudah dihuni. Kedepannya proses rumah hunian sementara akan dilanjutkan oleh BNPB dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam dapat bergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari dari setiap diri manusia. Setiap kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan yang ada di sekitar masyarakat demi kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, masyarakat di sekitar lereng gunung semeru memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan diri mereka jika sewaktu-waktu terdapat bencana erupsi maupun gunung meletus. Pengetahuan itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk menyelamatkan diri bila masyarakat sekitar gunung semeru menghadapi bencana, kebiasaan itu terbentuk sejak lahir dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan pengertian di setiap kejadian yang mereka alami terhadap fenomena dan masalah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang menjadi kebutuhan wajib. Untuk memenuhi kebutuhan wajib itu Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat Rumah Hunian Sementara. Rumah Hunian sementara adalah rumah hunian yang dibutuhkan saat pasca bencana sebagai tempat mengungsi, rumah hunian sementara digunakan untuk tempat penampungan keluarga yang rumahnya terkena dampak bencana alam. Masyarakat yang terdampak bencana alam akan dilindungi oleh konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan sebagai implementasi kebijakan terkait penanggulangan bencana maka dibentuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana. Dengan adanya

Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan bahwa semua masyarakat yang terdampak bencana alam akan mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali dalam penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana. Penanganan pengungsi disini diartikan dalam penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam segera dilakukan pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Demikian juga keadaan darurat bencana dapat diartikan dimana keadaan yang ditentukan oleh pemerintah dalam rentang waktu tertentu atas dasar pengarahannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memutuskan suatu kondisi di daerah tertentu.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagian kebijakan yang mencakup dari serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Namun pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi serta memiliki kerentanan yang juga tinggi tidak akan berdampak banyak jika masyarakat memiliki tingkat waspada dan ketahanan yang tinggi bila sewaktu waktu bencana itu terjadi sehingga kerugian material dan korban jiwa dapat di minimalisasi.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Menurut Putra (dalam Ismail & Sofwani, 2016) perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah

konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.

Tjokroamidjojo (dalam Ismail & Sofwani, 2016) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan”.

Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. (dalam Ismail & Sofwani, 2016) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1. *Agenda setting*
2. *Formulation dan legitimation*
3. *Program Implementations*
4. *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
5. *Decisions about the future of the policy and program*

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan kebijakan publik yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah suatu peristiwa mengancam dan mengganggu yang mengakibatkan dampak dan kerugian besar bagi masyarakat yang terdampak.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana (BNPB,2020) status keadaan darurat diputuskan oleh pemerintah yang terbagi dalam tiga tingkatan. Pada tingkatan nasional keadaan darurat diputuskan oleh presiden, pada tingkatan provinsi diputuskan oleh gubernur, dan pada tingkatan kabupaten diputuskan oleh bupati atau walikota.

Keadaan darurat bencana terbagi menjadi tiga jenis status tergantung pada kondisi yang terjadi di lapangan. Tiga jenis status darurat bencana yaitu :

1. Status Siaga Darurat.

Status Siaga Darurat adalah kondisi ketika ada potensi ancaman bencana yang datang ke suatu daerah tertentu dengan adanya informasi dini yang diberikan oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

2. Status Tanggap Darurat.

Status Tanggap Darurat adalah suatu kondisi dimana ancaman bencana yang terjadi dan telah mengganggu aktivitas, kehidupan dan pekerjaan masyarakat sekitar yang terdampak bencana.

3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah suatu kondisi dimana ancaman bencana yang sedang berlangsung menunjukkan tanda-tanda penurunan aktivitas atau telah berhenti sedangkan masyarakat masih terganggu aktivitas dan kehidupannya.

Bencana apapun yang sedang terjadi di suatu tempat akan berdampak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut yang menjadikan masyarakat akan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Penyusunan rencana proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan pemerintah akan masuk setelah proses tanggap darurat selesai. Proses aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan membutuhkan waktu yang di butuhkan untuk koordinasi lintas sektor.

Untuk mendukung rekonstruksi dan rehabilitasi Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang rencana penanggulangan bencana tahun 2019-2023 yang didalamnya berisikan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dimaksud berdasarkan hasil analisis resiko yang timbul akibat bencana yang sudah terjadi.

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lumajang terdapat ringkasan eksekutif yang termuat sebagai berikut :

1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah.

2. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang, baik pemerintah daerah mau pun non pemerintah.
3. RPB Kabupaten Lumajang periode 2019-2023 ini akan diperkuat dalam sebuah aturan daerah, yaitu minimal Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang.
4. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2022.
5. Hasil KRB Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2022 mengidentifikasi 10 risiko bencana dan 8 (delapan) diantaranya berada pada tingkat risiko tinggi yaitu bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan tsunami. Sedangkan bencana yang lain seperti gempa bumi berada pada tingkat risiko rendah dan bencana letusan gunung api berada pada tingkat risiko sedang.
6. Kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang merupakan gabungan dari IKD dan penanganan akar masalah tiap-tiap ancaman.
7. Isu strategis dan akar masalah ini menjadi dasar penyusunan RPB yang diturunkan menjadi 7 (tujuh) Kegiatan dan 75 Aksi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang.

Rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Disamping itu, kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dokumen RPB memiliki masa perencanaan lima tahun (2019-2023) berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang digunakan untuk memberikan dasar

bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan kajian risiko bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggara penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur maupun nasional, serta perencanaan tata ruang wilayah.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga merumuskan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi gunung semeru sebagai proses rehabilitasi dan rekontruksi mengingat bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 telah terjadi Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, yang berdampak pada rusaknya hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berakibat warga terdampak mengungsi.

Penanganan dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru utamanya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat agar dapat kembali hidup secara layak dan bermartabat serta aman, maka diperlukan langkah yang tepat melibatkan semua potensi secara terencana dan terkoordinasi dalam penyediaan hunian sementara. Untuk melaksanakan penyediaan hunian sementara yang efektif diperlukan pedoman dan apabila seseorang ingin menyusun peraturan kebijakan atau perundang-undangan

yang baik, maka seseorang perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusunnya. Berikut adalah cara singkat pengetahuan dan keterampilan tersebut.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang serius dalam menanggapi tentang bencana alam yang melanda masyarakat sekitar gunung semeru yang harapannya masyarakat Kabupaten Lumajang mendapatkan relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang dapat dihuni.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Program Rumah Hunian Sementara Bagi Masyarakat Yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat Kabupaten Lumajang pada pemerintah Kabupaten Lumajang yang diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi informasi dan juga edukasi pada masyarakat umum terkait pentingnya kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Program Rumah Hunian Sementara Bagi Masyarakat Yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru (Studi Kasus Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian diatas peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah kabupaten lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian sebagai pembatas suatu permasalahan yang diteliti agar pembahasan yang dikaji tidak terlalu luas. Menurut

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa sebuah penelitian perlu mengemukakan situasi sosial pada tempat yang diteliti.

Untuk membatasi pembahasan yang meluas, serta memperoleh kejelasan gambaran mengenai materi penelitian, maka lingkup pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru dengan sub focus :

- a. Indikator Kebijakan Pemerintah (X).

1. Penyelenggaraan.
2. pendataan dan verifikasi.
3. Pembangunan.
4. Penerima.
5. Penyerahan.
6. peran Pemberi.
7. Larangan.
8. Sanksi.

- b. Indikator Kepuasan Masyarakat (Y).

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan
5. Kompetensi pelaksana
6. Perilaku pelaksana
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
8. Sarana dan prasarana

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kepuasan masyarakat dalam pengadaan program rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang diuraikan penulis dalam penelitian, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca berupa manfaat teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta kepuasan masyarakat terhadap kebijakan program rumah hunian sementara yang di berikan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan juga bahan untuk mengembangkan penelitian bagi pembaca atau peneliti yang ingin mengangkat topik penelitian serupa.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat bahan pengembangan ilmu administrasi negara dan dapat memahami teori-teori yang dipelajari selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penulis untuk dapat memahami teori-teori yang dipelajari selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

b. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.



c. Bagi Objek

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan masukan dan juga perspektif pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan program rumah hunian sementara yang di berikan Pemerintah Kabupaten Lumajang.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari analisis regresi sederhana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Program Rumah Hunian Sementara Bagi Masyarakat Yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru”. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kebijakan pemerintah terhadap kepuasan masyarakat yang ada di rumah hunian sementara. Artinya semakin baik kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah terhadap rumah hunian sementara maka semakin puas masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru. Hal ini dibuktikan Koefisien regresi X sebesar 0.441 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variable Kebijakan Pemerintah (X) dengan variable Kepuasan Masyarakat (Y) yang mengindikasikan jika makin baik Kebijakan Pemerintah (X) maka akan meningkatkan Kepuasan Masyarakat.
2. Masyarakat akan semakin puas terhadap kebijakan pemerintah terkait rumah hunian sementara yang sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan Koefisien regresi X sebesar 0.441 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variable Kebijakan Pemerintah (X) dengan variable Kepuasan Masyarakat (Y) yang mengindikasikan jika makin baik Kebijakan Pemerintah (X) maka akan meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran-saran bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai masukan yaitu :

1. bagi pemerintah, dalam kaitannya dengan kepuasan masyarakat yang ada di rumah hunian sementara fasilitas yang ada sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya fasilitas perlu di tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di rumah hunian sementara.
2. Untuk lokasi yang di tentukan dalam membangun rumah hunian sementara, adanya lowongan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan karena pekerjaan masyarakat yang dulu jauh atau sudah hilang.
3. Sosialisasi lebih lanjut diperlukan agar masyarakat yang sudah lanjut usia lebih bisa mengerti tentang pendataan dan penyelenggaraan rumah hunian sementara.

5.3 Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat, taufik dan hidayah-NYA penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kurang sempurna skripsi ini.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad

Anggara. 2018. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia

Subianto. 2020. Kebijakan Publik. Surabaya : PT Menuju Insan Cemerlang

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta

Jurnal dan Skripsi:

Haedar Akib. (2010). *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makasar.

Sitinjak. (2023). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi,Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer Akuntansi Terhadap Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Kelian Mitra Karya

Mohamad Kharis Umardani. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai. Universitas Yarsi.

Pramono & Kinansi. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat). Unirversitas Slamet Riyadi.

Ritonga. (2020). Jurnal Kewahyuan Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Taqiy & Kurniawan. (2023). Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Hunian Sementara Bagi Penyintas Erupsi Gunung Semeru. Universitas Negeri Surabaya.
- Antoro. (2016). Sistem Bantu Administrasi Pendataan Penduduk Desa Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Asariansyah, Saleh, Rengu. (2013). Paartisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya.
- Assaad. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati). UMI Makasar.
- Hesti. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial BPNT Selama masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Fajrin, J., Muchlis, M., & Tandean, Y. R. (2020). Pengembangan Desain Hunian Sementara Untuk Korban Gempa Lombok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 103–109.
<http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jpm/article/view/1077/761>
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*. <https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/BukuKebijakanPublik.pdf>
- Islami, N. W. (2022). ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN PUJON, NGANTANG DAN KASEMBON. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 4(1), 47–57.
<http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/62>
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf

Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *KEBIJAKAN PUBLIK*.

Putra, D. S., & Azis, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan E-filing Terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Bandung. *EProceedings of Management*, 6(2).

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>

Taufiqurokhman, D., & PeneRBIT, Ms. (n.d.). *Riwayat Penulis*.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*. <https://bnpb.go.id/> Diakses 12 November 2022

Muhammad Andriansyah, ST. 2021. *Efektivitas Konsep Model Dan Implementasi Hunian Sementara Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi Sulawesi Tengah 2018 Studi Kasus Model Huntara Di Kabupaten Sigi*

Dyah Puspa Ayu, Budi Prayitno, Agus Haryadi. 2020. *Fabrikasi Hunian Sementara Untuk Pasca Bencana*. Jurusan Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Anggiat Purba, Siswo Hadi Sumantri, Anwar Kurnadi, Dimas Raka Kurniawan Putra. 2022. *Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru*. Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Mustainah M1 dan Moh. Royfand. 2022. *Problematika Dan Kesiapsiagaan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

Landasan Hukum :

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebijakan Penanganan Pengungsi Pasca Bencana. <https://bnpb.go.id/> Diakses 13 November 2022.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023.



Indonesia. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru.

